

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2017 NOMOR 7

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 22 Maret 2017
NOMOR : 7 TAHUN 2017
TENTANG : UNIT PELAKSANAAN TEKNIS INSTALASI
PENGELOLAAN LUMPUR TINJA PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum



NOMOR 7

2017

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TENTANG:

UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI PENGELOLAAN
LUMPUR TINJA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja pada Dinas Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah

diubah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan.....

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan :

Peraturan Wali kota Sukabumi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 35);

menetapkan.....

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI
PENGELOLAAN LUMPUR TINJA PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali kota adalah Wali kota Sukabumi.
3. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja adalah Unit Pelaksana Teknis Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi.

6. kepala upt.....

6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Walikota ini dibentuk UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja pada Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

pasal 3.....

Pasal 3

UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pengolahan limbah tinja yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. kepala subbagian tata usaha;
dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali kota ini.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengolahan limbah tinja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas dalam perencanaan dan penanganan bidang pengolahan limbah tinja;
 - b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif pengolahan limbah tinja;
 - c. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPT INSTALASI PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 6

(1) Kepala UPT mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan pelaksanaan bidang pengolahan limbah tinja;
- b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja;
- c. membuat rencana kerja UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengolahan limbah tinja yang meliputi pengolahan, penampungan, dan pemrosesan lumpur tinja;
- e. mengadakan koordinasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;

f. pengoordinasian.....

- f. pengoordinasian pengolahan, penampungan, dan pemrosesan lumpur tinja;
 - g. pengoordinasian, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana instalasi pengelolaan lumpur tinja;
 - h. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengolahan limbah tinja;
 - i. mempertanggungjawabkan tugas UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
 - j. mempertanggungjawabkan tugas UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja secara operasional kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh:
- a. subbagian tata usaha; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian kedua.....

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT, dalam hal:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan instalasi pengelolaan lumpur tinja;
- b. pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan program UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja;
- d. penyiapan bahan usulan tarif dan pengelolaan instalasi pengelolaan lumpur tinja;
- e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor di lingkungan UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja;
- f. pengelolaan dan pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja);

g. pengoordinasian.....

- g. pengoordinasian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian tata usaha dibantu oleh:
- a. pengelola administrasi ketatausahaan;
 - b. pengelola administrasi keuangan;
 - c. pengelola sarana dan prasarana instalasi pengelolaan lumpur tinja; dan
 - d. pengelola retribusi.

BAB V

ESELONERING

Pasal 8

Eselonering pada UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa;
- b. kepala subbagian tata usaha adalah jabatan eselon IVb.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja.

(3).jumlah.....

- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3).Setiap.....

- (3) Setiap pimpinan pada UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian

Bagian Kedua

Hal Berhalangan

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja tidak berada di tempat, kepala subbagian tata usaha mewakili Kepala UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja.
- (2) Dalam hal Kepala UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali kota menunjuk kepala subbagian tata usaha atau salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pejabat struktural di lingkungan UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja diangkat dan diberhentikan oleh Wali kota.

(2).Kepala.....

- (2) Kepala UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Setiap pimpinan pada UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali kota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 22 Maret 2017

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 22 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI

ttd.

M.N HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2017 NO 7

